

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan tumbuhnya perekonomian yang semakin meningkat, muncul berbagai macam lembaga keuangan, baik lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non-bank. Bank dalam perekonomian merupakan lembaga keuangan yang memiliki peranan penting bagi suatu negara.

Dengan adanya lembaga keuangan di suatu daerah, maka akan berdampak positif pada perekonomian rakyat. Masyarakat dapat lebih berkembang dengan adanya lembaga keuangan. Lembaga keuangan menjadi pengarah untuk pertumbuhan perekonomian pada suatu daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Arestis et al (1996), Xu (2000) dan Fase dan Abma (2003) menunjukkan bahwa dengan berkembangnya sistem keuangan suatu negara maka mempunyai hubungan yang positif terhadap pertumbuhan perekonomian.

Perekonomian di kabupaten Purworejo dalam 5 tahun terakhir tidak terjadi pergeseran struktur ekonomi yang berarti. Struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Purworejo masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Purworejo masih berada pada kisaran 25 hingga

28%.¹ Sumbangan terbesar pada tahun 2015 dihasilkan oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, disusul kemudian oleh lapangan usaha industri pengolahan, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, lapangan usaha konstruksi, dan lapangan usaha jasa pendidikan. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya masing-masing di bawah 6%.²

Pada tahun 2015, PDRB per kapita Kabupaten Purworejo mencapai 19.479.387 rupiah dengan pertumbuhan sebesar 8,93% dibandingkan tahun 2014. Jika diperhatikan PDRB per kapita Kabupaten Purworejo terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2011, PDRB per kapita masih 13,69 juta rupiah, lima tahun kemudian berubah menjadi 19,48 juta rupiah atau meningkat 42,19%. Dengan kata lain terjadi pertumbuhan PDRB per kapita rata-rata 9,78% per tahun.³

¹ BPS Kabupaten Purworejo, *PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Purworejo 2011-2015*, (Purworejo: BPS Kabupaten Purworejo 2016) hlm. 47-48

² *Ibid.*, hlm. 48

³ *Ibid.*, hlm. 49-50

Tabel 1.1 Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen) 2011-2015

Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014*	2015**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	28,13	27,19	27,15	25,97	25,99
B	Pertambangan dan Penggalian	0,74	0,72	0,71	0,77	0,82
C	Industri Pengolahan	17,48	17,40	17,42	18,26	18,38
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,07	0,07	0,06	0,06
F	Konstruksi	8,26	8,39	8,29	8,43	8,44
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,66	13,25	13,10	12,68	12,42
H	Transportasi dan Pergudangan	5,10	5,12	5,13	5,32	5,41
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,17	2,08	2,03	2,04	2,05
J	Informasi dan Komunikasi	4,59	4,64	4,54	4,60	4,51
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,52	3,59	3,52	3,45	3,53
L	Real Estat	1,98	1,95	1,93	1,97	2,02
M,N	Jasa Perusahaan	0,24	0,25	0,26	0,26	0,27
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,38	4,47	4,34	4,19	4,15
P	Jasa Pendidikan	6,18	7,38	7,89	8,20	8,19
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,30	1,41	1,45	1,53	1,56
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,11	2,01	2,09	2,19	2,14
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka Sementara

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo

** Angka sangat sementara

Tabel 1.2 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen) 2011-2015

Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014*	2015**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,78	0,20	1,66	-1,91	4,35
B	Pertambangan dan Penggalian	-7,85	5,30	4,87	6,61	2,48
C	Industri Pengolahan	6,66	5,31	6,88	7,62	5,18
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,81	11,12	7,03	2,40	-2,55
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,90	-2,92	-1,08	3,24	4,31
F	Konstruksi	0,32	6,64	4,58	4,23	4,31
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,69	2,97	4,74	4,81	4,17
H	Transportasi dan Pergudangan	3,54	8,94	8,35	6,92	7,08
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,30	2,70	2,95	6,43	5,24
J	Informasi dan Komunikasi	8,16	10,77	7,60	13,33	7,33
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,70	1,45	3,33	3,29	6,51
L	Real Estat	6,44	6,86	7,69	7,01	6,08
M,N	Jasa Perusahaan	8,90	8,40	11,04	8,11	8,17
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,76	0,53	2,29	0,43	4,30
P	Jasa Pendidikan	16,53	18,56	9,23	10,09	6,98
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,10	11,48	9,23	10,09	6,98
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,13	3,52	10,09	8,79	3,01
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		5,64	4,59	4,94	4,49	5,12

* Angka Sementara

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo

** Angka sangat sementara

Tabel 1.3 Tingkat Rata-Rata Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha 2011-2015

No	Bidang	Rata-rata
1	Jasa Pendidikan	12,278
2	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,776
3	Informasi dan Komunikasi	9,438
4	Jasa Perusahaan	8,924
5	Transportasi dan Pergudangan	6,966
6	Real Estat	6,816
7	Industri Pengolahan	6,33
8	Jasa lainnya	5,308
9	Pengadaan Listrik dan Gas	5,162
10	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,324
11	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,276
12	Konstruksi	4,016
13	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,456
14	Pertambangan dan Penggalian	2,282
15	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,216
16	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,862
17	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,09

Sumber data: Diolah

Laju pertumbuhan riil PDRB menurut lapangan usaha 2011-2015 di kabupaten Purworejo mengalami fluktuasi pada setiap bidangnya, khususnya untuk bidang jasa keuangan dan asuransi. Pada tingkatan rata-rata laju pertumbuhan riil PDRB menurut lapangan usaha 2011-2015 di Kabupaten Purworejo jasa keuangan dan asuransi berada pada rangking 13. Diatas bidang jasa keuangan dan asuransi terdapat bidang konstruksi dan dibawahnya terdapat bidang pertambangan dan penggalian. Konstruksi adalah kegiatan usaha dalam pekerjaan gedung dan bangunan sipil, baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Sedangkan pertambangan dan penggalian adalah komoditi yang mencakup 4 kategori, diantaranya: pertambangan minyak dan gas bumi (migas), pertambangan batubara dan lignit, pertambangan bijih logam serta pertambangan dan penggalian lainnya.

Pada tahun 2011-2015, Selama kurun waktu tersebut, kontribusi jasa keuangan dan asuransi berada pada kisaran 3,45 hingga 3,59%. Pada tahun 2015, kategori ini berkontribusi sebesar 3,53%. Sementara itu, selama kurun waktu 5 tahun terakhir, pertumbuhan yang dialami kategori jasa keuangan dan asuransi selalu positif, bahkan pada tahun 2015 menunjukkan pertumbuhan terbesar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu mencapai 6,51%.

Salah satu yang mempengaruhi perkembangan perekonomian di Purworejo yaitu keuangan dan asuransi. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan laju pertumbuhan riil PDRB menurut lapangan usaha. Dari tahun 2014 ke tahun 2015 yang mengalami kenaikan paling tinggi dari semua bidang yaitu jasa

keuangan dan asuransi. Kenaikan laju pertumbuhan pada jasa keuangan dan asuransi dari tahun 2014 ke tahun 2015 yaitu sebesar 3,22%.

Meningkatnya pertumbuhan pada jasa keuangan di Kabupaten Purworejo mempunyai potensi dalam pengembangan lembaga keuangan, baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non-bank. Pertumbuhan dan kinerja positif sektor keuangan akan berkorelasi positif terhadap kinerja ekonomi suatu daerah. Sektor keuangan dapat menjadi sumber utama dalam pertumbuhan sektor riil ekonomi. Semakin banyak alokasi dana pihak ketiga perbankan yang dialokasikan pada sektor-sektor riil maka akan semakin berkurang tingkat pengangguran dan kemiskinan dalam sebuah perekonomian.

Keuangan merupakan aspek penting yang melekat dalam kehidupan masyarakat luas. Pengetahuan keuangan yang dimiliki individu dapat membantu dalam menentukan keputusan-keputusan dalam menentukan produk-produk finansial yang dapat mengoptimalkan keputusan keuangannya.

Kebutuhan masyarakat Purworejo akan jasa keuangan yang kian meningkat, kini banyak jasa keuangan yang berdiri di Purworejo. Lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional sudah banyak di Purworejo. Dengan banyaknya lembaga keuangan di Purworejo ini dapat mempengaruhi PDRB di Purworejo.

Mayoritas masyarakat penduduk Purworejo menganut agama yaitu Islam dengan presentase 97,7%. Seharusnya hal ini dapat menjadi potensi pengembangan lembaga keuangan syariah di Purworejo. Akan tetapi, hingga

saat ini lembaga keuangan syariah di Purworejo masih terbatas. Lembaga keuangan syariah yang tersedia di Purworejo masih hanya ada BMT.

Pada tahun 1995 lembaga keuangan syariah sudah mulai berdiri di Purworejo. Sekitar tahun 1992 muncul sebuah organisasi mahasiswa informal yang bernama FUMIP (Forum Ukhuwah Mahasiswa Islam Purworejo). Organisasi tersebut menjadi ajang temu kangen para mahasiswa Islam Purworejo. Organisasi ini berusaha untuk peduli dan merespon setiap fenomena-fenomena terbaru, termasuk ketika munculnya ide Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), FUMIP berusaha untuk merespon dan sekaligus mencoba menghadirkan LKMS di Kabupaten Purworejo.⁴

Bermula dengan di undangya FUMIP untuk mengikuti pelatihan sistem bagi hasil di Semarang pada awal tahun 1995, maka kegiatan tersebut ditindak lanjuti untuk mewujudkan berdirinya sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah.⁵

Tabel 1.4 Jumlah Koperasi di Kabupaten Purworejo

	2012	2013	2014
KUD	18	18	18
Non KUD	277	251	247

Sumber: BPS Kab. Purworejo

Kebutuhan masyarakat akan lembaga keuangan syariah yang meningkat, dapat mendorong didirikannya BMT-BMT di Purworejo.

⁴ <http://bmtbinamas.blogspot.co.id/2009/10/profil-bmt-binamas.html>

⁵ *Ibid*

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Purworejo bisa dikatakan mengalami perkembangan yang baik karena jumlah BMT yang terus bertambah. Hingga saat ini (Desember 2016) BMT di Purworejo berjumlah 11 BMT yang terdaftar pada DISPERINDAGPAR Kabupaten Purworejo.⁶ Hal ini dikarenakan minat masyarakat terhadap BMT yang semakin menambah. Akan tetapi, jika dilihat dari jumlah koperasi yang ada di Kabupaten Purworejo, jumlah BMT masih sedikit. Namun yang perlu dilihat adalah semakin bertambahnya jumlah BMT dalam 21 tahun ini.

BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang masih mempunyai beberapa kekurangan yang tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat akan lembaga keuangan syariah yang semakin meningkat, menjadikan perlu adanya fasilitas yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Maka dari itu, masyarakat membutuhkan lembaga keuangan syariah yang lebih dari BMT, yaitu bank syariah agar dapat menerima fasilitas yang lebih. BMT mempunyai beberapa kekurangan, diantaranya tidak adanya fasilitas ATM, tidak dapat melakukan transfer, kliring, dan lain-lain. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Gustina (2015) meningkatnya jumlah perbankan syariah untuk dapat menampung kebutuhan masyarakat.

Deputi Komisioner Pengawas Perbankan OJK, Mulya E Siregar mengatakan *market share* perbankan syariah saat ini 4,86%, sejalan dengan kondisi perekonomian nasional yang mulai membaik sehingga telah berdampak

⁶ Kantor pusat DISPERINDAGPAR di Kabupaten Purworejo

pada pangsa pasar perbankan syariah.⁷ Pada saat ini pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia masih dibawah 5%. Untuk memperluas pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia, seharusnya bank syariah mulai memperbanyak penyebaran bank-bank syariah di kota-kota kecil.

Salah satu alasan peneliti melakukan penelitian di Purworejo karena perkembangan lembaga keuangan syariah di Purworejo yang terus berkembang namun sampai saat ini belum ada Bank Syariah yang berdiri di Purworejo. Sudah 21 tahun lembaga keuangan syariah di Purworejo sampai saat ini hanya ada BMT. Hal ini menyebabkan Purworejo terlihat kurang dalam perkembangan lembaga keuangan syariah. Dilihat dari kota-kota yang berdekatan dengan Purworejo yaitu Yogyakarta, Magelang dan Kebumen, semua kota tersebut sudah berdiri Bank Syariah. Bahkan kota-kota yang berdekatan dengan Purworejo sudah berdiri lebih dari satu Bank Syariah.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, penelitian ini berusaha meneliti potensi pengembangan perbankan syariah di Purworejo, yang akan penulis susun dalam skripsi yang berjudul ***“Analisis Peta Potensi Pengembangan Perbankan Syariah di Kabupaten Purworejo”***.

B. Rumusan Masalah

Bank merupakan lembaga yang mempunyai peran penting dalam membantu pertumbuhan perekonomian daerah. Salah satunya bank syariah,

⁷ Fuad, Hafid. Selasa, 27 September 2016 – 23:06 WIB. “Market Share Bank Syariah Terus Meningkat”. SindoNews.com. diakses pada 20 Oktober 2016

yang kini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat muslim. Saat ini bank syariah sedang dalam proses berkembang, dikarenakan target pangsa pasar yang belum tercapai oleh bank syariah. Bank syariah harusnya lebih menjangkau kota-kota kecil yang mempunyai potensi untuk dikembangkannya bank syariah. Seperti Kabupaten Purworejo, kota kecil yang sampai saat ini belum ada bank syariah disana.

Dari uraian di atas, maka peneliti merumuskan pertanyaan peneliti, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat pengetahuan *financial literacy* masyarakat di Kabupaten Purworejo?
2. Bagaimana pertumbuhan jasa *funding* dan *financing* pada BMT di Kabupaten Purworejo?
3. Bagaimana peta potensi pengembangan perbankan syariah di Kabupaten Purworejo berdasarkan tingkat pengetahuan *financial literacy* dan pertumbuhan *funding* dan *financing*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat tentang *financial literacy*.
2. Untuk menganalisis pertumbuhan *funding* dan *financing* di BMT.
3. Untuk menganalisis potensi pengembangan bank syariah di Purworejo berdasarkan tingkat pengetahuan *financial literacy* dan pertumbuhan *funding* dan *financing*.

D. Batasan Penelitian

Peneliti dalam melakukan penelitian ini, mempunyai beberapa batasan diantaranya yaitu:

1. Peneliti dalam meneliti tingkat pengetahuan *financial literacy* masyarakat hanya fokus pada lembaga perbankan.
2. Peneliti dalam meneliti pertumbuhan *funding* dan *financing* BMT hanya melihat berdasarkan data saja.

E. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan secara teoritik
 - a. Hasil penelitian dapat diharapkan memberikan kontribusi pemikiran dan dapat dijadikan sebagai rujukan penelitian selanjutnya tentang potensi pengembang bank syariah.
 - b. Menambah ilmu pengetahuan, khususnya tentang bank syariah.
2. Kegunaan secara praktis
 - a. Bagi peneliti selanjutnya

Sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya terutama yang berminat untuk mengkaji tentang potensi pengembangan bank syariah dalam lingkup yang berbeda.
 - b. Bagi Akademik

Untuk mengetahui pemahaman masyarakat di Purworejo tentang potensi pengembangan bank syariah disana sekaligus sebagai langkah memberikan pemahaman pada masyarakat tentang perbankan syariah.

Hasil penelitian diharapkan dapat menyumbang kajian ilmu dan pengetahuan.

c. Bagi instansi yang terkait

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan juga bagi lembaga-lembaga yang berkecimpung dalam dunia ekonomi dan bisnis Islam.

F. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu dimaksudkan agar dapat menggali informasi lebih mengenai penelitian ini. Peneliti juga dapat membedakan hasil penelitian yang terdahulu dan yang sedang diteliti ini. Penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Sri Lestari (2015) mengadakan penelitian yang berjudul “Literasi Keuangan Serta Penggunaan Produk Jasa Lembaga Keuangan”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat literasi keuangan dari produk dan jasa keuangan kepada mahasiswa FE dan Bisnis UNSOED. Penelitian ini menganalisis seberapa besar pemahaman mahasiswa jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNSOED dalam mengelola keuangannya dan bagaimana pengenalan mereka terhadap lembaga keuangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif (reduksi data, penyajian data dengan bagan dan teks, kemudian penarikan kesimpulan).⁸

Farah Margaretha dan Reza Arief Pambudhi (2015) mengadakan penelitian yang berjudul “Tingkat Literasi Keuangan Pada mahasiswa S-1

⁸ Lestari, Sri (2015). Literasi Keuangan Serta Penggunaan Produk Dan Jasa Lembaga Keuangan. Jurnal Fokus Bisnis, Volume 14, No 02

Fakultas Ekonomi”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara deskriptif tingkat literasi keuangan pada mahasiswa S-1 Fakultas Ekonomi. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis ragam satu arah (ANOVA). Pertama adalah statistik deskriptif, statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), median, modus, standar deviasi, maksimum dan minimum. Statistik deskriptif merupakan statistik yang menggambarkan atau mendeskripsikan data menjadi sebuah informasi yang lebih jelas dan mudah untuk dipahami. Kedua adalah analisis ragam satu arah (Oneway Analysis of Variance/ Oneway ANOVA). Hal ini digunakan untuk membandingkan purata (mean) yang lebih dari dua sampel. Dalam pengujian hipotesis, kriteria untuk menolak atau tidak menolak H_0 berdasarkan P-value jika $\text{sig.} < \alpha 0,05$, maka H_0 ditolak dan jika $\text{sig.} > \alpha 0,05$ maka H_0 diterima.⁹

Gustina (2011) mengadakan penelitian yang berjudul “*Islamic Banking System: Studi Analisis Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia*”. Penelitian ini bertujuan untuk membahas kinerja dari perbankan syariah di negara Indonesia. Penelitian ini juga bermaksud untuk menelaah *current status* dari *Islamic banking* tersebut. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif sehingga tidak menggunakan analisis ekonometrik.¹⁰

⁹ Margaretha, Farah dan Arief Pambudhi Reza, (2015), *Tingkat Literasi Keuangan Pada Mahasiswa S-1 Fakultas Ekonomi*. Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti: JMK, VOL. 17, NO. 1, MARET 2015, 76–85 ISSN 1411-1438 print / ISSN 2338-8234 online

¹⁰ Gustina, (2011), *Islamic Banking System: Studi Analisis Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia*, Politeknik Negeri Padang: Jurnal Akuntansi & Manajemen Vol 6 No. 1 Juni 2011 ISSN 1858-3687

Hasan (2011) mengadakan penelitian yang berjudul “Analisis Industri Perbankan Syariah di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, yaitu mendeskripsikan data yang sudah ada pada 5 tahun terakhir.¹¹

Ali Sakti (2013) mengadakan penelitian yang berjudul “Pemetaan Kondisi dan Potensi Bmt: Kemitraan dalam rangka Memperluas Pasar & Jangkauan Pelayanan Bank Syariah kepada Usaha Mikro”. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data individual populasi BMT; memperoleh data profil, kebutuhan peningkatan kapasitas (*need assessment*) dan identifikasi *good practices* BMT responden; merumuskan *policy recommendation* untuk Pemerintah atau stakeholders terkait. Penelitian ini menggunakan metode sampel survei pada populasi BMT yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Analisis kajian ini akan menggunakan kombinasi analisis deskriptif kualitatif melalui studi komparasi berdasarkan literatur terkait dan analisis kuantitatif berupa grafik dan tabel.¹²

Bambang Sudiyatno (2010) mengadakan penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Bopo, Car dan Ldr Terhadap Kinerja Keuangan Pada Sektor Perbankan yang *Go Public* di Bursa Efek Indonesia (Bei) (Periode 2005-2008)”. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti adanya

¹¹ Hasan, (2011), *Analisis Industri Perbankan Syariah di Indonesia*. Universitas Wahid Hasyim Semarang: Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan Vol 1, No. 1

¹² Sakti, Ali, (2013), *Pemetaan Kondisi dan Potensi Bmt: Kemitraan dalam Rangka Memperluas Pasar & Jangkauan Pelayanan Bank Syariah kepada Usaha Mikro*. Bank Indonesia. Jurnal al-Muzara'ah, Vol. I, No. 1, 2013

temuan yang berbeda dari beberapa faktor yang mempengaruhi *Return on Asset* (ROA), serta dari data empiris adalah terjadi beberapa penurunan ROA, sehingga standar ROA sebesar 1,5 % tidak dapat dicapai oleh sebagian bank pada periode 2004-2008. Pada penelitian ini jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Model analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda (*multiple regression analysis model*) dengan persamaan kuadrat terkecil (*Ordinary Least Square*).¹³

¹³ Sudiyatno, Bambang. (2010). *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, BOPO, CAR Dan LDR Terhadap Kinerja Keuangan Pada Sektor Perbankan Yang Go Public di Bursa Efek Indonesia (Bei) (Periode 2005-2008)*. Universitas Stikubank Semarang: Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan ISSN: 1979-4878 Vol. 2 No.

Tabel 1.5 Tabulasi / Tabel sebagai Variasi Penjelas Tinjauan Pustaka

No	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Sri Lestari (2015) “Literasi Keuangan Serta Penggunaan Produk Jasa Lembaga Keuangan”	1. Tingkat literasi keuangan terhadap lembaga keuangan di Indonesia masih rendah 2. Hambatan literasi keuangan dikalangan mahasiswa FE dan Bisnis UNSOED, diantaranya: tidak mendapat pendidikan keuangan dari keluarga sejak kecil, tidak diajarkan di pendidikan formal sejak kecil, tidak mendapat materi dan pemahaman yang dalam dari mata kuliah yang diperoleh selama kuliah, terbatasnya dana yang diterima dari orang tua sehingga tidak dapat digunakan untuk berinvestasi pada produk dan jasa lembaga keuangan.	1. Objek penelitiannya menggunakan masyarakat kabupaten Purworejo 2. Hanya mengukur tingkat literasi keuangannya dan tidak menganalisis hambatan dari literasi keuangannya.
2	Farah Margaretha dan Reza Arief Pambudhi (2015)	Tingkat literasi keuangan pada mahasiswa Strata-1 Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti secara keseluruhan adalah 48,91%, yang termasuk dalam	1. Objek penelitiannya masyarakat Kabupaten Purworejo

	“Tingkat Literasi Keuangan pada Mahasiswa Strata-1 Fakultas Ekonomi”	kategori rendah (< 60%). Jenis kelamin, usia, IPK dan pendapatan orang tua memiliki pengaruh terhadap literasi keuangan mahasiswa. Tahun masuk mahasiswa (angkatan), tempat tinggal, dan pendidikan orang tua tidak memiliki pengaruh terhadap literasi keuangan.	2. Bukan penelitian komparasi (membandingkan), yang melihat tingkat literasi keuangan dari jenis kelamin, usia, IPK dan pendapatan orang tua.
3	Gustina (2011) <i>Islamic Banking System: Studi Analisis Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia</i>	Penelitian ini mengulas tentang perkembangan dari perbankan syariah Indonesia. 1. Solusi yang dapat kita lakukan dapat ditinjau dari dua sisi yaitu sudut pandang religius dan sudut pandang dunia bisnis/ ekonomi. Meningkatkan pemahaman tentang perbankan syariah dengan edukasi yang baik serta menciptakan keahlian yang mumpuni adalah beberapa hal yang dapat dilihat dari sisi religi. Selanjutnya, dari segi bisnis, beberapa hal yang perlu dilakukan adalah: Peningkatan kualitas SDM; 2. Menciptakan produk yang berdaya saing tinggi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia;	1. Penelitian tersebut cakupannya se-Indonesia, sedangkan penelitian ini se-Kabupaten Purworejo. 2. Penelitian tersebut menganalisis kendala dari perkembangan perbankan syariah, sedangkan penelitian ini menganalisis potensi pengembangan perbankan syariah.

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Meningkatkan jumlah perbankan syariah itu sendiri untuk dapat menampung kebutuhan masyarakat; 4. Dan adanya regulasi pemerintah yang memberikan dukungan positif untuk terciptanya atmosfer perbankan syariah di Indonesia. 	
4	Hasan (2011) “Analisis Industri Perbankan di Indonesia”	<ol style="list-style-type: none"> 1. Industri perbankan kini berkembang dengan pesat namun relatif masih kecil dibandingkan dengan perbankan nasional dan industri keuangan secara umum. 2. Ancaman pendatang baru begitu lebih besar dengan tingginya pertumbuhan industri perbankan syariah nasional. 3. Untuk saat ini persaingan bank syariah yang ada saat ini relatif rendah, namun kedepan akan cenderung tinggi dengan banyaknya pendatang baru di bank syariah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian tersebut cakupannya se-Indonesia, sedangkan penelitian ini se-Kabupaten Purworejo. 2. Penelitian tersebut lebih menganalisis tentang bagaimana mempertahankan pengembangan bank syariah dari berbagai ancaman, sedangkan penelitian ini menganalisis apa saja potensi pengembangan bank syariah.

		4. Ancaman produk substitusi cenderung tinggi, yaitu produk keuangan yang dari bank konvensional maupun lembaga keuangan lain.	
5	Ali Sakti (2013) “Pemetaan Kondisi dan Potensi Bmt: Kemitraan dalam rangka Memperluas Pasar & Jangkauan Pelayanan Bank Syariah kepada Usaha Mikro”	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara umum BMT telah menjadi industri yang memainkan peran sangat sentral dalam membuka akses permodalan bagi usaha mikro kecil, namun secara kelembagaan dan operasional BMT memerlukan pembenahan khususnya pada aspek tata-kelola industri dan aspek internal BMT seperti operasional dan manajemen; 2. <i>Linkage</i> antara bank syariah dan BMT memberikan dukungan yang signifikan bagi perkembangan BMT karena memberikan manfaat bukan hanya pada aspek kinerja keuangan, tetapi juga transfer pengetahuan dan keahlian manajerial. 3. Beberapa hal yang menjadi masalah pada BMT: (a) Permodalan dari BMT yang masih sangat terbatas; (b) Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek penelitian ini merupakan kabupaten Purworejo 2. Pemetaan potensi perbankan syariah dan bukan BMT

		<p>BMT menunjukkan bahwa keahlian para karyawan yang belum cukup mendukung dalam menjaga keberlangsungan BMT; (c) Peraturan pemerintah yang belum mendukung terciptanya <i>macro governance</i> yang baik dalam industri BMT; (d) Kondisi masyarakat yang masih belum mengenal keberadaan BMT; (e) Infrastruktur yang masih sangat minim dalam mendukung kinerja BMT.</p>	
6	<p>Bambang Sudyatno (2010) “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Bopo, Car dan Ldr Terhadap Kinerja Keuangan Pada Sektor Perbankan yang <i>Go Public</i> di Bursa Efek Indonesia (Bei) (Periode 2005-2008)”.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja bank (ROA). Artinya semakin banyak dana pihak ketiga yang bisa dihimpun bank, maka akan semakin tinggi kinerja bank (ROA). 2. Biaya operasi (BOPO) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja bank (ROA). Artinya semakin tinggi biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank, maka akan menurunkan pendapatan operasional bank, sehingga kinerja bank (ROA) menurun. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek penelitiannya di BMT Purworejo 2. Penelitian ini hanya meneliti bagian <i>funding</i> atau lebih dekat dengan Dana Pihak Ketiga (DPK). 3. Mengukur tingkat DPK pada BMT di Purworejo.

	<p>3. <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja bank (ROA). Artinya semakin tinggi modal yang ditanam atau diinvestasikan di bank, maka semakin tinggi kinerja bank (ROA).</p> <p>4. <i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja bank (ROA). Artinya pengaruh <i>loan deposit ratio</i> (LDR) terhadap kinerja bank (ROA) sangat kecil sehingga secara statistik tidak signifikan pada level signifikansi kurang dari 5%.</p>	
--	--	--

G. Kerangka Teoritik

1. Financial Literacy

(*Organization for Economic Cooperation and Development*) OECD

mendefinisikan literasi keuangan sebagai:

“*A combination of awareness, knowledge, attitude, skill and behaviours necessary to make sound financial decision and ultimately achieve individual wellbeing*” (sebuah kombinasi kesadaran, pengetahuan, sikap, keahlian dan perilaku yang diperlukan untuk membuat keputusan keuangan yang baik dan pada akhirnya mencapai kondisi keuangan individu yang lebih baik).¹⁴

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan bahwa literasi keuangan adalah rangkaian atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), keyakinan (*competence*), dan keterampilan (*skill*) konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan dengan baik.¹⁵

Sebelum menyusun cetak biru Strategi Nasional literasi keuangan Indonesia, pada tahun 2013 OJK melakukan survei nasional yang dilaksanakan di 20 provinsi dengan melibatkan 8.000 orang responden. Hasil survei dimaksud adalah sebagai berikut:

¹⁴ Atkinson, Adele & Flore, (2011), *An Internationally Comparable Survey Of Financial Literacy*. OECD Paper.

¹⁵ OJK. (2016), *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia*, Direktorat Literasi dan Edukasi

Tabel 1.7 Tingkat *Financial Literacy* di 20 Provinsi

	Perbankan	Asuransi	Perusahaan Pembiayaan	Dana Pensiun	Pasar Modal	Pergad aian
Well Literate	21,80%	17,84%	9,80%	7,13%	3,79%	14,85 %
Sufficient Literate	75,44%	41,69%	17,89%	11,74%	2,40%	38,89 %
Less Literate	2,04%	0,68%	0,21%	0,11%	0,03%	0,83%
Not Literate	0,73%	39,80%	72,10%	81,03%	93,79%	45,44 %
Utilitas	57,28%	11,81%	6,33%	1,53%	0,11%	5,04%

Sumber: OJK (Strategi Nasional Literasi Keuangan Nasional)

Dari data tersebut terlihat bahwa *financial literacy* masyarakat nasional lebih pada lembaga perbankan dengan utilitas 57,28%, angka tersebut menunjukkan angka paling tinggi dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Dan *financial literacy* masyarakat nasional paling rendah pada lembaga pasar modal dengan utilitas 0,11%.

Literasi keuangan telah menjadi program nasional untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya. Literasi keuangan memiliki beberapa manfaat bagi (industri keuangan, masyarakat dan ekonomi makro), diantaranya:¹⁶

Industri Keuangan:

¹⁶ *Ibid*

- a. Semakin tinggi potensi transaksi keuangan yang dilakukan masyarakat sehingga potensi keuangan yang diperoleh lembaga jasa keuangan (LJK) semakin besar; dan
- b. Memotivasi LJK mengembangkan produk dan layanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Masyarakat:

- a. Masyarakat mampu memilih dan memanfaatkan produk jasa keuangan;
- b. Masyarakat memiliki kemampuan dalam melakukan perencanaan keuangan dengan lebih baik;
- c. Terhindar dari aktivitas investasi pada instrument keuangan yang tidak jelas;
- d. Mendapatkan pemahaman mengenai manfaat dan risiko produk dan jasa keuangan.

Ekonomi Makro:

- a. Semakin banyak masyarakat yang *well literate* semakin banyak jumlah pengguna produk dan jasa keuangan sehingga pada akhirnya akan menciptakan pemerataan kesejahteraan;
- b. Semakin banyak yang menabung dan berinvestasi diharapkan sumber dana untuk pembangunan semakin meningkat;

- c. Semakin banyak orang yang memanfaatkan dana lembaga jasa keuangan diharapkan semakin besar.



Sumber: OJK (Strategi Nasional Literasi Keuangan Nasional)

Upaya yang digunakan adalah melalui penyusunan strategi nasional literasi keuangan Indonesia yang terdiri dari 3 pilar, yang merupakan upaya komprehensif dan sistematis untuk mencapai masyarakat yang *well literate* yang dirumuskan dengan memperhatikan kondisi saat ini.

Pilar 1 – Edukasi dan kampanye nasional literasi keuangan

- a. Meningkatkan *awareness*, pengetahuan dan keterampilan masyarakat mengenal produk dan jasa keuangan;
- b. Mengubah pola pikir dan perilaku keuangan masyarakat; dan
- c. Meningkatkan jumlah pengguna produk jasa keuangan.

Pilar 2 – Penguatan infrastruktur literasi keuangan

- a. Memperkuat dan mendukung edukasi dan kampanye nasional literasi keuangan;
- b. Memperluas dan mempermudah akses informasi-informasi literasi keuangan; dan
- c. Mendorong keberlangsungan program literasi keuangan.

Pilar 3 – Pengembangan produk dan jasa keuangan

- a. Mendorong lembaga jasa keuangan untuk mengembangkan produk dan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- b. Mendorong lembaga jasa keuangan meningkatkan kualitas dan jasa keuangan; dan

- c. Mendorong lembaga jasa keuangan untuk memperluas jaringan area jasa keuangan.

Berdasarkan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia, literasi keuangan masyarakat diklasifikasi dalam 4 tingkatan, yaitu:

- a. *Well Literate*

Memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

- b. *Sufficient Literate*

Memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan.

- c. *Less Literate*

Hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan.

- d. *Not Literate*

Tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, serta tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

Sedangkan menurut Chen and Volpe (1998) mengkategorikan literasi keuangan menjadi tiga kelompok, yaitu

- a. < 60% yang berarti individu memiliki pengetahuan tentang keuangan yang rendah.
- b. 60%–79%, yang berarti individu memiliki pengetahuan tentang keuangan yang sedang.
- c. > 80% yang menunjukkan bahwa individu memiliki pengetahuan keuangan yang tinggi.

Pengkategorian ini didasarkan pada persentase jawaban responden yang benar dari sejumlah pertanyaan yang digunakan untuk mengukur literasi keuangan.

Financial literacy umumnya yang dikenal pada masyarakat luas hanya pada lembaga keuangan bank. Cakupan *financial literacy* tidak hanya pada lembaga keuangan bank melainkan masih banyak lembaga keuangan lainnya, seperti lembaga pembiayaan, dana pensiun, pegadaian, asuransi dan pasar modal. Lembaga-lembaga keuangan tersebut, yaitu:

- a. Perbankan

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dana atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹⁷

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai dagangan utamanya.¹⁸

b. Pembiayaan

Istilah pembiayaan mungkin bukan istilah yang dikenal oleh masyarakat secara luas, namun ketika kita berbicara tentang *leasing* maka masyarakat akan segera mengetahui seperti apa jasa yang ditawarkan. Secara umum, masyarakat mempersiapkan *leasing* sebagai perusahaan yang menawarkan jasa kredit pada kendaraan seperti mobil atau motor selain bank.¹⁹ Berdasarkan prinsip syariah, usaha *leasing* dilakukan berdasarkan akad *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik*.²⁰

c. Dana pensiun

¹⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Jakarta), hlm. 24

¹⁸ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia 2002) hlm. 29

¹⁹ OJK, *Pembiayaan Seri Literasi Keuangan Indonesia*, (2016), hlm. 3

²⁰ Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana 2010) hlm. 383

Dana pensiun menurut UU No. 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.²¹ Lembaga dana pensiun mengumpulkan dan mengelola iuran yang dibayar baik oleh peserta atau pemberi kerja. Tujuannya adalah agar pekerja atau karyawan dapat menjalani masa pensiun dengan mandiri dan layak, dengan menerima uang pensiun setiap bulannya secara regular. Adanya kontribusi iuran yang bersumber dari peserta atau pemberi kerja inilah yang membedakan dana pensiun dengan tabungan, asuransi atau investasi pribadi lainnya.²²

d. Pegadaian

Menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak.²³ Pegadaian syariah atau dikenal dengan istilah *rahn*, dalam pengoperasiannya menggunakan dua metode, yaitu *ujrah* atau *Fee Based Income* (FBI) dan *mudharabah* (bagi hasil). Namun hingga saat ini *ujrah* masih mendominasi. Pegadaian syariah dilakukan dengan dua akad, yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*.

e. Asuransi

²¹ *Ibid.*, hlm. 292

²² OJK, *Dana Pensiun Seri Literasi Keuangan Indonesia*, (2016) hlm. 3

²³ OJK, *Pegadaian Seri Literasi Keuangan Indonesia*, (2016) hlm. 4

Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang usaha perangsurasian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pengganti kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung.²⁴

Asuransi syariah (*ta'min, takaful atau tadhamun*) dalam Fatwa DSN-MUI adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/ pihak melalui investasi dalam bentuk aset/ atau *Tabaru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Akad yang sesuai dengan yang dimaksud adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan *maksiat*.²⁵

f. Pasar Modal

²⁴ Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana 2010) hlm. 286-287

²⁵ *Ibid.*, hlm 286-287

Pasar modal secara umum merupakan suatu tempat dimana para penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Sedangkan pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.²⁶

Ketika negara Islam mengalami permasalahan fiskal dan neraca utang (*balance of payment*) yang sangat serius, maka perbankan syariah tetap harus berkembang. Pada tahun 1980-an terjadi pendapatan minyak yang sangat menurun hingga pada takaran yang telah menyebabkan negara Islam mengalami permasalahan. Berikut merupakan penjelasan pertumbuhan keuangan Islam pada saat itu:²⁷

- a. Munculnya sebuah perekonomian global yang membatasi opsi-opsi bentuk pemerintah suatu negara dengan karakterisasi oleh norma dan ideology baru;
- b. Transformasi sektor keuangan, yang semakin mangaburkan batas antara bank komersial di satu sisi dan bank investasi dan aktivitas keuangan Islam lain di sisi lain;

²⁶ Soemitra, Andri, *Bank .*, hlm. 111

²⁷ Warde, Ibrahim, *Financial Finance Keuangan Islam dalam Perekonomian Global*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009) hlm. 203

- c. Kebangkitan Islamisme, yang telah menekan pemerintahan di seluruh dunia Muslim untuk mengizinkan produk-produk dan institusi-institusi keuangan yang berbasis keagamaan;
- d. Segala perhatian pada bidang etika, politik, ekonomi dan sosial sebagai akibat dari globalisasi yang tidak terkendali dan pencairan atas perbaikan.

2. Peran Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Islam

Secara rasional, beberapa dasar pemikiran peranan masyarakat, diantaranya yaitu sebagai berikut:

a. Konsekuensi *Fardhu Kifayah*

Fardhu kifayah merupakan suatu kewajiban yang tidak boleh dilanggar oleh masyarakat. Konsep *fardhu kifayah* merupakan mengacu pada tanggung jawab oleh masyarakat.²⁸ Tanggung jawab tersebut dapat tanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan negara. Maka dari itu seseorang dituntut menjadi kaya agar dapat memenuhi tanggung jawabnya tersebut. Usaha manusia untuk memperoleh kekayaan, disamping suatu masalah yang fitrah, hal ini juga merupakan suatu kewajiban atau keharusan.²⁹

²⁸ Misnam, Munrokim, Priyonggo Suseno dan Bhekti Hendrianto, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2014) hlm. 452

²⁹ Nur Kholis (et. al.), *Pengantar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Kopertasi Wilayah III UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012) hlm. 155

b. Adanya hak milik publik

Peranan masyarakat juga muncul karena adanya konsep hak milik publik dalam ekonomi Islam, seperti *waqf*. Kekayaan *waqf* adalah kekayaan masyarakat secara keseluruhan dan berlaku sepanjang masa, karenanya *waqf* merupakan hak milik masyarakat.³⁰

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ
وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Harta rampasan *fa’i* yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, Kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberika rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat keras hukuman-Nya.” (QS. 59:7)³¹

c. Bersosial

Mengorbankan jiwa dan tenaga untuk tujuan sosial sebagai pengganti pengorbanan uang. Orang beriman yang tidak memiliki sesuatu yang bernilai uang harus menyumbangkan jerih payah mereka untuk tujuan sosial.³²

d. Menjaga kegagalan pasar

³⁰ Misnam, Munrokim., Priyonggo Suseno dan Bhukti Hendrianto, *Ekonomi*. hlm. 453

³¹ Al-Qur’an terjemahan Kementerian Agama RI, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013) hlm. 546

³² Saefuddin, *Membumikan Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT PPA Consultants, 2011) hlm. 150-153

Kegagalan pasar tidak cukup hanya diselesaikan dengan peran pemerintah, sebab pemerintah juga memiliki kegagalan. Pasar bekerja dengan mekanisme permintaan dan penawaran dimana mensyaratkan suatu komoditas yang dapat diperdagangkan (*tradeable*). Komoditas seperti ini harus memiliki suatu harga (*priceable*), sedangkan untuk memiliki harga komoditas seperti ini otomatis harus bisa diukur (*measurable*). Dalam kenyataan, terdapat banyak kebutuhan masyarakat yang *unmeasurable*, karenanya juga *unpriceable* dan *untradeable*, sehingga tidak dapat disediakan oleh pasar. Komoditas seperti ini dapat disediakan secara efektif dan efisien oleh masyarakat. Bahkan, dalam menyediakan *tradeable goods* and *services*, masyarakat juga dapat berperan lebih efisien dibandingkan dengan pasar. Biaya transaksi (*transaction cost*) akan lebih rendah dibandingkan jika disediakan oleh pasar, sebab masyarakat tidak dimasukkan variabel keuntungan sebagaimana pelaku pasar. Motivasi masyarakat untuk berperan adalah bukan karena faktor-faktor finansial.³³

e. Menjaga kegagalan pemerintah

Meskipun peran pemerintah sangat berguna, termasuk dalam menjalankan *fardlu kifayah*, tetapi terdapat beberapa kelemahan-kelemahan. Hal ini selanjutnya dapat mengganggu efisien peranan

³³ Misnam, Munrokim, Priyonggo Suseno dan Bhekti Hendrianto, *Ekonomi*. hlm. 457

pemerintah sehingga diperlukan peran masyarakat secara langsung.

Beberapa kelemahan ini, yaitu:³⁴

- 1) Pemerintah sering tidak berhasil mengidentifikasi dengan tepat kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya, sehingga formulasi kebijakannya juga tidak tepat;
- 2) Pemerintah sering kali juga memiliki banyak masalah struktural yang dapat menghambat efektifitas dan efisien kebijakan, misalnya masalah birokrasi dan politik;
- 3) Keterlibatan pemerintah sering kali menimbulkan pengaturan yang berlebihan terhadap aktivitas perekonomian, sehingga justru menghambat mekanisme pasar dan peran masyarakat secara langsung.

3. *Funding dan Financing*

Funding dan financing ini merupakan jasa yang diterapkan oleh bank dan BMT, dan juga lembaga lain yang menerapkan jasa tersebut. *Baitul maal wattamwil* (BMT) terdiri dari dua makna, yaitu *baitul maal dan baitul tamwil*. *Baitul maal* mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti: *zakat, infaq dan shodaqoh*. Sedangkan *baitul tamwil* usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. kegiatan tersebut menjadi

³⁴ Ibid., hlm 458

bagian yang tidak dapat dipisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah.³⁵

Funding (penghimpunan dana) adalah mengumpulkan atau mencari dana (uang) dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito.³⁶ Produk penghimpunan dana (sumber dana) bank syariah dapat diperoleh dari empat sumber, yaitu modal, titipan, investasi dan investasi khusus.³⁷

Dalam penghimpunan dana dilakukan mobilisasi dan investasi tabungan dengan cara yang adil. Mobilisasi dana sangat penting karena Islam mengutuk penumpukan dan penimbunan harta dan mendorong penggunaanya secara produktif dalam rangka mencapai tujuan ekonomi dan sosial. Bank maupun BMT dalam menghimpun dana yaitu:

a. Modal inti

Modal inti adalah dana modal sendiri, yaitu dana yang berasal dari para pemegang saham sebagai pemilik. Modal inti dibagi menjadi tiga, yaitu:³⁸

1) Modal yang disetor oleh pemegang saham;

³⁵ Antonio., Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Depok: Gema Insani. 2001) hlm. 107

³⁶ Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004) hlm. 11

³⁷ Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. (Yogyakarta: Ekonisia. 2012) hlm. 65

³⁸ Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) hlm 73-74

- 2) Cadangan, yaitu sebagian sebagian laba yang tidak dibagi, disisihkan untuk menutup timbulnya risiko kerugian dikemudian hari;
- 3) Laba ditahan, yaitu sebagian laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham, tetapi oleh pemegang saham untuk ditanam kembali sebagai penambah dana modal.

b. Simpanan

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk, yaitu:

- 1) Giro *wadiah* adalah titipan pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, kartu *Automatic Teller Machine* (ATM), sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.³⁹
- 2) Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang disepakati.⁴⁰
- 3) Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang

³⁹ Yaya, Riya., Aji Erlangga Martawireja dan Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat. 2014) hlm. 53

⁴⁰ Soemitra, Andri, *Bank.*, hlm. 75-76

penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad yang telah disepakati.⁴¹

Financing (penyaluran dana) bank syariah dilakukan dengan berbagai metode, seperti jual-beli, bagi hasil, pembiayaan, pinjaman dan investasi khusus.⁴² Dalam penyaluran dana pada nasabah, secara garis besar produk-produk pembiayaan syariah terbagi kedalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:⁴³

- a. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang berdasarkan prinsip jual-beli;
- b. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa berdasarkan prinsip sewa;
- c. Transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil.

Penyaluran dana merupakan pemberian pembiayaan kepada nasabah yang membutuhkannya, dengan prinsip sebagai berikut:

- a. Prinsip jual beli
 - 1) *Murabahah* yaitu jual beli dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Skema ini dapat

⁴¹ *Ibid.*, hlm 77

⁴² Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. (Yogyakarta: Ekonisia. 2012) hlm. 70

⁴³ *Ibid* hlm. 70

digunakan oleh bank untuk nasabah yang hendak memiliki suatu barang, sedang nasabah yang bersangkutan tidak memiliki uang pada saat pembelian.

- 2) *Salam* adalah jual beli yang pelunasannya dilakukan terlebih dahulu oleh pembeli sebelum barang pesanan diterima.
- 3) *Istishna'* adalah jual beli yang didasarkan atas penugasan oleh pembeli kepada penjual yang juga produsen untuk menyediakan barang atau suatu produk sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati.

b. Prinsip investasi

- 1) *Mudharabah* yaitu transaksi penyaluran dana dengan skema *mudharabah*, bank bertindak sebagai *shahibul maal*, sedang nasabah yang menerima pembiayaan bertindak sebagai pengelola dana. Seluruh modal berasal dari bank sebagai *shahibul maal*.
- 2) *Musyarakah* yaitu kerjasama investasi para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung semua pemilik modal berdasarkan porsi modal masing-masing.

c. Prinsip sewa

- 1) *Ijarah* yaitu transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan.

Transaksi ini dapat diterapkan kepada nasabah yang menginginkan manfaat dari objek sewa yang disediakan dan tidak untuk memilikinya.

- 2) *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* yaitu transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disediakan dengan opsi perpindahan hak milik pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa.

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:⁴⁴

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.
- c. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.

⁴⁴ Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. 2005) hlm 17-18

- d. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.
- e. Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

- a. Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
- b. Upaya meminimalkan resiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada. Maka

dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.

- d. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dana penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi jumlah tabungan dalam masyarakat, diantaranya:

- a. Tingkat pendapatan masyarakat, jika pendapatan masyarakat tinggi maka akan menyisihkan pendapatannya untuk di simpan.
- b. Tingkat bagi hasil yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana dari bank syariah. Jika tingkat bagi hasil yang diberikan tinggi, maka masyarakat akan tertarik untuk menyimpan dananya di bank syariah.⁴⁵

Kemampuan bank dalam memperoleh sumber-sumber dana yang diinginkan sangat mempengaruhi kelanjutan usaha bank. Dalam mencari sumber-sumber dana bank harus mempertimbangkan beberapa faktor-faktor, seperti kemudahan untuk memperoleh dana, jangka waktu sumber dana serta

⁴⁵ Sadono sukirno, Makro Ekonomi: Teori Pengantar, Edisi III, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2004, hal 111.

biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh dana tersebut. Dalam hal ini, bank harus memajemen dengan baik menentukan untuk apa dana tersebut digunakan, seberapa besar dana yang dibutuhkan, sehingga tidak salah dalam menentukan pilihan.⁴⁶

Hubungan antara DPK dengan penyaluran pembiayaan adalah Salah satu sumber dana yang dapat digunakan untuk pembiayaan adalah simpanan masyarakat (DPK) semakin besar dana pihak ketiga yang dihimpun, akan semakin besar pula volume pembiayaan yang akan disalurkan.⁴⁷

H. Sistematika Pembahasan

1. BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, tinjauan pustaka terdahulu, kerangka teori yang relevan dan rerkait dengan tema skripsi yaitu berupa artikel ilmiah, hasil penelitian maupun buku serta sistematika pembahasan.

2. BAB II: METODE PENELITIAN

Memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan peneliti beserta justifikasi/alasannya; jenis penelitian, desain, lokasi, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, serta analisis data yang digunakan.

⁴⁶ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pres, 2010, hal 62.

⁴⁷ Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005). Hal. 55.

3. BAB III: HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi: a. hasil penelitian. Klasifikasi bahasan disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, dan rumusan masalah atau fokus penelitiannya. b. pembahasan, sub bahasan a. dan b. digabung menjadi satu kesatuan.

4. BAB IV: PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan. Saran diarahkan pada dua hal, yaitu:

- a. Saran dalam usaha memperluas hasil penelitian;
- b. Saran untuk menentukan kebijakan di bidang-bidang terkait dengan masalah atau fokus penelitian.